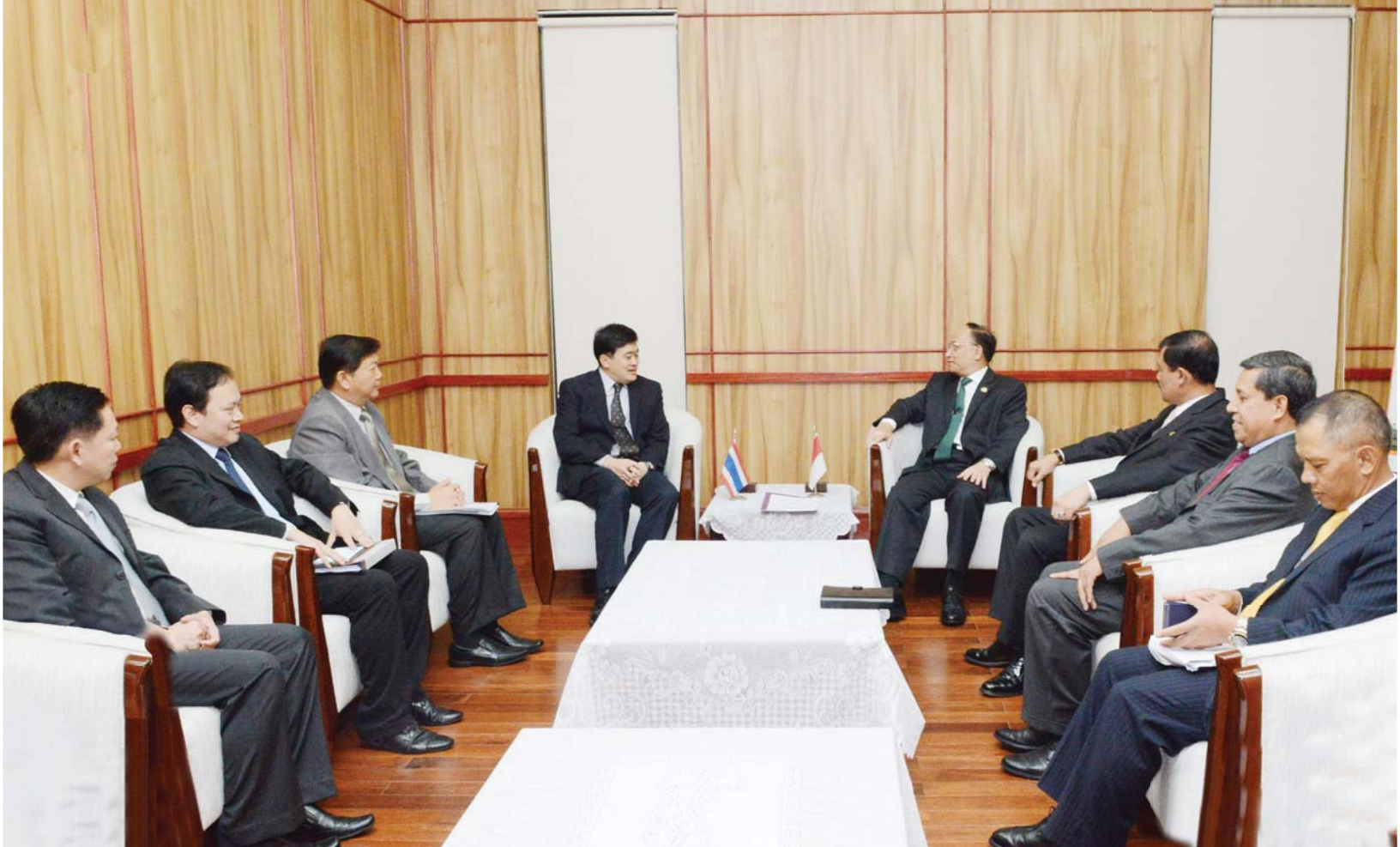




Lemhannas RI dan Delegasi *Permanent Mission of Thailand* Bicarakan Isu Keamanan

Thailand melalui delegasi Permanent Mission of Thailand to ASEAN yang dipimpin oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Thailand *Director General of the Department of ASEAN Affairs Arthayudh Srisamoot* beserta sembilan anggota yang berasal dari berbagai instansi mengunjungi Lemhannas RI pada hari Rabu (29/5).... (selengkapnya ke hal. 9...)



Lemhannas RI Menerima Kunjungan NDC India



Foto : Humas Lemhannas RI

Adanya rasa kedekatan karena kesamaan budaya Indonesia dengan negara lain bukan hanya dirasakan oleh negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Nusantara, tetapi juga dirasakan oleh negara yang terpisah lautan, yakni Negara India. Kesamaan ini diungkapkan para delegasi *National Defence College* (NDC) India saat berkunjung ke Lemhannas RI pada Senin (12/5).

Kedatangan delegasi NDC India yang dipimpin oleh Mayjen V P Singh ini, disambut dalam *courtesy call* oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi S.E. yang didampingi oleh Marsekal Muda TNI Beng Tardjani, M.Sc. selaku Tenaga Pengkaji Bidang Diplomasi, dan Brigadir Jenderal TNI Sudibyo, S.E. selaku Kepala Biro Kerjasama.

Dalam diskusi yang merupakan lanjutan dari *courtesy call*, salah satu delegasi NDC India menyatakan keheranannya karena Pancasila yang merupakan nama dasar negara Indonesia menggunakan bahasa Sansekerta. Peserta diskusi yang berasal dari Lemhannas RI pun menjelaskan isi dan makna dasar negara tersebut yang berkaitan erat dengan cita-cita kemerdekaan para *founding father* Indonesia. Kemerdekaan yang dapat mempersatukan keragaman dari berbagai budaya membuat para delegasi India memuji keberhasilan Indonesia atas kemampuannya dalam memelihara kesatuan dan rasa nasionalisme warganya. Setelah itu, diskusi berlanjut pada tema keragaman dan isu terorisme yang beberapa tahun belakangan ini menimpa Indonesia.

Dalam diskusi ini pihak Lemhannas RI juga menjelaskan profil lembaga ini dan program-program yang dijalankannya. Penjelasan profil ini terutama berfokus pada tiga tugas utama Lemhannas RI, yakni pendidikan kader pemimpin tingkat nasional, pengkajian yang menghasilkan rekomendasi khusus untuk presiden serta penguatan nilai-nilai kebangsaan untuk berbagai kalangan masyarakat. Kunjungan dan diskusi ini ditutup dengan penyerahan plakat dan profil Lemhannas RI kepada pihak NDC India dengan harapan kerjasama antar kedua lembaga terjalin semakin baik di masa mendatang.

DAFTAR ISI



2 Lemhannas RI Menerima Kunjungan NDC India



3 Mencari Langkah Solutif dalam Menghadapi Radikalisasi



4 Lemhannas RI Lakukan RDP dengan Komisi I DPR RI



4 Kunjungan Mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto



5 Indonesia Harus Mempunyai Sistem Pertahanan Negara Jangka Panjang



6 Roundtable Discussion Optimalisasi Hubungan Indonesia dan Australia



7 Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi dengan Sumber Daya Alam Tambang



8 Kunjungan Dubes RI untuk Jepang



8 Lemhannas RI Menerima Kunjungan NIDS Jepang



9 Lemhannas RI dan Delegasi *Permanent Mission of Thailand* Bicarakan Isu Keamanan



10 Jamuan Makan Gubernur Bersama Para Mantan Gubernur Lemhannas RI



10 Sosialisasi PPRA 53 Bagi Negara Sahabat



11 Lemhannas RI Merancang Program Pendidikan Kebangsaan untuk Anggota DPR RI Terpilih



12 Regenerasi Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji dan Pejabat Struktural

REDAKSI

Pengarah :

Marsdy TNI Dede Rusamsi, SE

Penanggung Jawab :

Laksm TNI E. Estu Prabowo, M.Sc.

Redaktur :

Ir. Yusita Pusparini, M.Sc

Penyunting/Editor :

Kolonel Laut (P) Maghoni.

Redaktur Pelaksana :

Trias Noverdi, S.S., Endah Heliana, S.Sos.,

Aditya Solehah S.Hum, Aska Leonardi, M. I. Kom,

Triana Rahmawaty, S.Hum.

Desain

Bambang Iman Aryanto, S.T.

Fotografer :

Arianto S.H., Sertu Syafrizal, Suryadi.

Sekretariat :

Linda Purnamasari S.Sos., Letkol Caj G.T. Situmorang, Gatot, Indah Winarni.

Distribusi :

Letkol Inf. Sumurung, Lettu Cba Supriyono.

Alamat Redaksi :

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110, Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926, Website <http://www.lemhannas.go.id>

Mencari Langkah Solutif dalam Menghadapi Radikalisasi



Foto : <http://www.solusinews.com/sites/default/files/field/image/Art%20Radikalisme.jpg>

Dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis, penyelenggaraan negara harus merangkul semua perbedaan yang muncul dari beragamnya suku, adat-istiadat, dan agama di wilayah Nusantara. Hal ini berarti kita harus siap untuk menerima dan mengelola tanpa adanya rasa ingin menyeragamkan segala perbedaan pendapat yang ada, yang sering berujung pada fanatisme radikal dan menjadi akar terorisme.

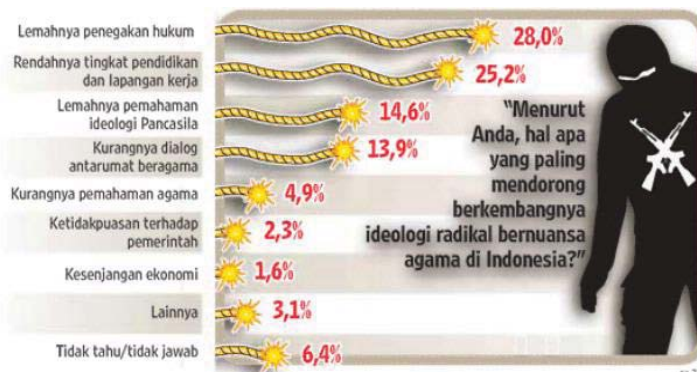
Kondisi inilah yang menjadi latar belakang terlaksananya *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertema “**Meningkatkan Penanggulangan Radikalisme Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional**” di Lemhannas RI. Kajian yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengkajian Pertahanan dan Keamanan ini dilaksanakan pada hari Selasa (13/5) di Ruang Rapat Gd. Asta Gatra Lt. 3. Diskusi dibuka oleh Mayjen TNI Hari Mulyono, S.E., M.M. yang mewakili Deputy Pengkajian Strategik, Irjen Pol Boy Salamuddin, dengan moderator Brigjen Pol Drs. Bambang Sukanto, S.H., M.H.

Kegiatan ini, menghadirkan empat orang pembicara yaitu Deputy I Bidang Pencegahan, Perlindungan & Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Agus Surya Bakti, Guru Besar Psikologi UI Prof. Dr. Hamdi Muluk, Kasubdit Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Dr. Mamat S. Burhanudin, M.A., dan Ustad Abdul Rahman Ayyub selaku Tokoh Masyarakat.

Dalam paparannya, Agus Surya Bakti berpendapat, bahwa radikalisme dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, radikalisme statis yang berwujud pada gagasan yang radikal, kedua adalah radikalisme destruktif yang merupakan wujud radikalisme yang merusak dengan penggunaan kekerasan sebagai pengejawantahan cita-cita yang diusungnya.

Hadir sebagai penanggap diskusi, yaitu Pakar Kriminologi UI Prof. Dr. Adrianus Meliala, Dir Padnas Kesbangpol Kemdagri RI Brigjen TNI Didi Sudiana, Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Katahanan Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI M. Nasir Madjid, dan Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hukum & HAM Lemhannas RI Irjen Pol Drs. Djoko Prastowo, M.H.

Diskusi yang berlangsung selama 4 jam ini juga membicarakan langkah-langkah preventif dan solutif dalam menghadapi radikalisme yang sudah merambah ke banyak aspek kehidupan, mulai dari ranah sosial, agama, hingga ekonomi. Para pembicara dan penanggap berusaha mencari rumusan aplikatif atas masalah ini untuk kemudian direkomendasikan kepada presiden dan bidang-bidang pemerintahan terkait.



Sumber : Kompas

Lemhannas RI Lakukan RDP dengan Komisi I DPR RI

Seuai dengan undangan dari Sekertariat Jenderal DPR RI, Lemhannas RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI untuk membahas APBN-P tahun 2014 berdasarkan skala prioritas yang berorientasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas RI, yakni menyelenggarakan fungsi pendidikan, pengkajian, dan pematapan nilai-nilai kebangsaan. Dalam RDP yang dilaksanakan pada Selasa (21/5) di Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gd. Nusantara II DPR RI Lt. 1 ini, Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. mengajukan tiga alternatif tambahan anggaran.

Ketiga alternatif usulan tambahan anggaran tersebut, yang disertai dengan rincian penggunaannya, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang memadai dalam rapat guna pengambilan keputusan. Dalam rapat ini Gubernur Lemhannas RI menjelaskan mengenai tiga alternatif anggaran yang diharapkan dapat disetujui oleh Komisi I DPR RI.

Ketiga alternatif anggaran tersebut dibuat berdasarkan keadaan yang akan dihadapi lembaga ini di sisa tahun 2014. **Pertama** adalah perkiraan waktu turunnya anggaran dan kemampuan eksekusi, **kedua**



adalah kecepatan penyerapan yang harus tepat waktu dan jadwal audit BPK RI di Lemhannas RI, **ketiga** adalah tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI sebagai penyelenggara pendidikan yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Hal lain yang mempengaruhi pembuatan tiga alternatif anggaran APBN-P 2014 ini adalah meluasnya lingkup kerja Lemhannas RI yang tidak lagi terbatas pada penyelenggaraan pendidikan di Kampus Medan Merdeka Selatan, melainkan mulai menjangkau garda-garda terdepan NKRI.

Setelah mendengar penjelasan dari Budi Susilo Soepandji, seluruh anggota dewan Komisi I DPR RI menyatakan bahwa mereka menerima dan dapat memahami alasan dan penjelasan atas pengajuan usulan penambahan anggaran TA 2014 itu dan akan mempertimbangkannya, dan memperjuangkan kebutuhan anggaran ini di rapat APBN-P selanjutnya.

Kunjungan Mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto ke Lemhannas RI

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan wajib dalam program perkuliahan, rombongan mahasiswa dari Program Studi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto berkunjung ke Lemhannas RI pada hari Rabu, (21/5). Banani Ma'mur, M. Si selaku ketua rombongan mahasiswa mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah di kota Jakarta-Bandung.

Dengan didampingi empat orang dosen, 30 mahasiswa ini diterima oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Lemhannas RI Laksamana Pertama TNI E. Estu Prabowo, M.Sc. yang didampingi oleh Kepala Bagian Humas Rohumas Ir. Yusita Pusparini, M. Sc. di Ruang Rapat Gd. Asta Gatra Lt. 3.

Meski mahasiswa yang terlibat dalam kunjungan ini baru menempuh empat semester dalam pendidikannya, Banani Ma'mur menilai mereka telah menerima dasar teori yang cukup untuk memahami pendidikan kebangsaan yang dilakukan oleh Lemhannas RI. Hasil dari KKL ini pun nantinya akan diseminarkan oleh para mahasiswa untuk dinilai sebaik apa kemampuan mereka

dalam menyerap informasi yang diberikan oleh lembaga-lembaga yang dikunjungi.

Pada kesempatan ini Estu Prabowo menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Lemhannas RI dan sejarah kedudukan lembaga ini di pemerintahan. Hal prinsip yang perlu dikenalkan kepada publik tentang Lemhannas RI adalah kepanjangan dari akronimnya, yakni Lembaga Ketahanan Nasional, bukan Lembaga Pertahanan Nasional sebagaimana pengetahuan yang umum beredar di masyarakat. "Pertahanan lebih bermakna fisik seperti halnya persenjataan, sedangkan ketahanan merupakan konsep pemikiran yang berfokus pada jiwa dan semangat kebangsaan," demikian penjelasan Kepala Biro Humas Lemhannas RI tersebut.

Selain memaparkan tentang sejarah dan perkembangan Lemhannas RI, Estu Prabowo juga memberikan sedikit penjelasan terkait geopolitik, geostrategi, wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Mengutip pernyataan Presiden RI Ir. Soekarno saat memberikan kuliah pertamanya pada pembukaan Kursus Reguler Angkatan (KRA-kini lebih dikenal PPRA)-red, ia menyatakan bahwa

pertahanan nasional hanya dapat dilaksanakan secara sempurna, bila suatu bangsa mendasarkan pertahanan nasional atas pengetahuan geopolitik.

“Ada tiga faktor yang membentuk karakter bangsa Indonesia, yaitu sejarah lahirnya negara, bangsa dan tanah air, serta cita – cita dan ideologi bangsa yang menghasilkan konsepsi wawasan nusantara dalam mencapai tujuan dan cita – cita nasional.” tambahnya. Kunjungan ini diakhiri dengan tanya jawab dan pemberian cinderamata dari kedua belah pihak. Banani Ma'mur berharap penerimaan yang baik atas kunjungan ini nantinya akan berlanjut pada kerjasama-kerjasama lain yang lebih signifikan di masa depan.



Foto: Humas Lemhannas RI



Foto: Humas Lemhannas RI

Berbicara mengenai permasalahan kesehatan yang terdapat di Indonesia, dr. Untung Suseno Sutarjo mengatakan bahwa kawasan Indonesia bagian timur memiliki kualitas gizi yang perlu mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan kawasan Indonesia bagian barat. Wilayah Nusa Tenggara Timur adalah salah satu wilayah di kawasan Indonesia bagian timur yang memiliki masalah dengan kualitas gizi penduduk.

Selain itu, kawasan Indonesia bagian timur juga masih kekurangan tenaga medis serta fasilitas kesehatan, terutama di daerah Maluku dan Papua. Salah satu penyebabnya adalah maldistribusi tenaga medis yang sebagian besar karena enggan mengabdikan di luar pulau Jawa. “Mestinya daerah dengan (adanya) desentralisasi, membiayai kebutuhan dasar tersebut. Tapi kenyataannya sekarang semua masih bergantung dari pusat,” jelas Untung Suseno Sutarjo selaku narasumber sesi pertama Dialog Kebangsaan Pimpinan Tingkat Nasional Tahun 2014.

Sementara dalam paparannya, Drs. Sukendramartha, M.Sc, M. App. Sc. menjelaskan bahwa diharapkan setiap warga negara ini akan memiliki rasa cinta tanah air yang sama dimanapun berada termasuk di daerah perbatasan. Tetapi kembali lagi kepada realitas sebagaimana telah disebutkan oleh Untung Suseno Sutarjo, bahwa salah satu hambatan penguatan nasionalisme adalah aspek pelayanan

Indonesia Harus Mempunyai Sistem Pertahanan Negara Jangka Panjang

kesehatan yang ternyata memang belum merata. “Secara logika, bila kesejahteraan berkurang maka rasa cinta tanah air boleh jadi menurun, terutama di daerah perbatasan,” sebut Sukendramartha.

Bertindak sebagai moderator pada sesi pertama dalam Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan pada Rabu (21/5), adalah Effendi Gazali, yang berhasil mengemas tema wilayah perbatasan dengan diselingi humor-humornya yang menyegarkan. Sedangkan yang bertindak selaku moderator pada sesi kedua adalah Brigjen Pol. Dr. H. Anton Charlyan, MPKN dengan mengusung tema peningkatan wawasan kebangsaan guna percepatan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan nasional.

Pada sesi kedua, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa dalam membangun sistem pertahanan Negara, tidak bisa hanya melihat dari *single management* saja, tetapi merupakan bagian dari manajemen multinasional yang berkontribusi terhadap sistem pertahanan negara. Terdapat landasan dimana itu adalah hal fundamental yang berisi mengenai bagaimana konstitusi mengamankan, dan bagaimana legalitas serta kepentingan nasional yang kita miliki. “Kita harus mempunyai sistem pertahanan negara jangka panjang nasional,” tegas Sjafrie Sjamsoeddin.

Roundtable Discussion Optimalisasi Hubungan Indonesia dan Australia



Foto : Humas Lemhannas RI

Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara tetangga tidak selalu berjalan dengan mulus dan kondusif. Perkembangan lingkungan strategis yang berkaitan dengan berbagai aspek dalam dan luar negeri dapat menjadi penyebab konflik yang senantiasa muncul. Dengan latar belakang tersebut, Lemhannas RI melalui Deputi Bidang Pengkajian Strategik Direktorat Pengkajian Hubungan Internasional menyelenggarakan *Roundtable Discussion* (RTD) yang mengangkat tema **“Optimalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia-Australia guna Memperkokoh Politik Luar Negeri Indonesia dalam rangka Ketahanan Nasional.”**

Jalinan kerjasama bilateral yang dibangun antara Indonesia-Australia selama ini sudah memiliki pilar yang mapan. Hubungan antara kedua negara dalam satu dekade terakhir tampak cukup harmonis. “Dari sisi kerjasama kemitraan, terdapat beragam bentuk kerjasama antara lain bidang politik, keamanan, maupun ekonomi. Bahkan kedua negara memiliki lebih dari 200 perjanjian kerjasama di berbagai bidang. Hal itu sesungguhnya menyiratkan adanya hubungan bilateral yang baik di antara kedua negara. Sehubungan dengan itu, sudah seharusnya keduanya memiliki komitmen dan moral politik untuk tetap menjaga jalinan kerjasama bilateral tersebut,” jelas Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA.

“Secara geografis, Australia merupakan negara tetangga di bagian selatan Indonesia. Melihat posisi strategis tersebut, Indonesia harus mampu menjadi *‘counterbalancing partner’* dalam hal ekonomi, budaya, dan pertahanan,” pungkas Tenaga Profesional Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lemhannas RI Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, yang bertindak sebagai moderator pada acara tersebut.

Pada acara yang bertempat di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lt. 4 Barat Lemhannas RI, Rabu (21/5), dibahas pula mengenai dinamika hubungan Indonesia-Australia. Dinamika hubungan tersebut dapat terlihat dari kesejarahan Indonesia saat masih di bawah Pemerintah Hindia Belanda, dimana banyak pelajar

Indonesia yang dikirim ke Australia untuk belajar. “Hubungan Indonesia dan Australia seperti *‘rollercoaster’*. Memburuknya hubungan Indonesia dan Australia mulai terlihat sejak referendum Timor Leste pada tahun 1990, serta membaik pada saat pembentukan Lombok *Treaty* 2009,” kata Nadjib Riphath Kesoema. Ditariknya kembali Dubes Indonesia untuk Australia beberapa waktu yang lalu juga merupakan respon Indonesia atas sikap Australia atas kebijakan pemerintahan Abbott yang menerapkan kebijakan ***turn back the boat*** untuk para pencari suaka. “Langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan diplomasi pemerintah Indonesia yang menurunkan hubungan Indonesia dan Australia,” Nadjib Riphath Kesoema menambahkan.

Sementara itu, Prof. Yanyan M. Yani, MAIR, Ph. D., mengatakan bahwa dalam melihat hubungan Indonesia dan Australia, Pemerintah Indonesia harus bijak dalam menyikapi hubungan kedua negara tersebut. “Indonesia harus bijak dalam menyikapi ***East Asia Summit*** serta ***Australia’s Strategic Edge*** di tahun 2020 nanti. Untuk itu perlu dibangun komunikasi politik yang baik,” kata Prof. Yanyan M. Yani.

Budi Susilo Soepandji mengharapkan diskusi ini akan melahirkan berbagai olah pikir, masukan, dan sumbang saran yang komprehensif serta holistik, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan solusi efektif terkait dengan dinamika hubungan politik antara Indonesia dan Australia. Sehingga nantinya hal tersebut dapat menjadi dasar kebijakan yang akan diambil guna memperkuat politik luar negeri Indonesia dan berimplikasi meningkatkan ketahanan nasional.

Diskusi tersebut menghadirkan narasumber Nadjib Riphath Kesoema, Dubes RI untuk Australia; Prof. Yanyan M. Yani, MAIR, Ph.D., Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional dan Program Doktor Unpad; Agus Sriyono, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam RI; Teuku Faizasyah, Staf Ahli Presiden Hubungan Internasional; serta Penanggap Utama yakni Kepala Lembaga Sandi Negara Mayjen TNI Dr. Joko Setiadi, M.Si., dan Tenaga Profesional Bidang Hubungan Internasional dan Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI Marsda TNI (Purn) Syahrul Ansory.

Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi dengan Sumber Daya Alam Tambang

Mineral dan batu bara (minerba) merupakan komoditi strategis bagi percepatan pembangunan negara yang selama ini diekspor dalam bentuk bahan baku yang tidak memiliki nilai tambah. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor bijih mineral yang diatur dalam UU No. 4 tahun 2009. Dampak kebijakan saat ini mulai membawa banyak perubahan positif ke berbagai aspek kehidupan di tanah air, meskipun banyak pengusaha tambang yang merasa keberatan dengan hal tersebut.

Bertempat di ruang rapat Gd. Asta Gatra Lt. 4, Deputi Pengkajian Strategik Direktorat Pengkajian Ekonomi mengadakan *Roundtable Discussion* dengan tema **"Dampak Eksploitasi Sumber Daya Alam Tambang terhadap Nilai Tambah Ekonomi Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional"** pada Kamis (22/5). Acara ini dimoderatori oleh Tenaga Profesional Ketahanan Nasional dan Geostrategik Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar, S.Ip. dan dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A.

Dalam kajian ini, Lemhannas RI menghadirkan narasumber yang tidak hanya berkaitan dengan tema, namun juga ahli di bidangnya. Narasumber tersebut antara lain Wamen ESDM RI, Susilo Siswoutomo; Deputi I Bid. Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup RI, Imam Hendargo; Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian RI Ir. Hanjanto, M. Eng.; Presiden Direktur PT. Freeport Rozik B. Soeipto, dan Direktur Utama PT. Newmont Martiono Hadianto. Dalam kajian

ini, para narasumber memaparkan nilai tambah ekonomi di berbagai bidang yang dapat dikembangkan dengan mengolah minerba di negeri sendiri.

Dalam pengantar diskusi, Gubernur Lemhannas RI mengatakan, "Kita harus ingat bahwa tujuan utama dari pengendalian ekspor bukan menghambat perdagangan tetapi memanfaatkan kekayaan mineral nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa melalui peningkatan nilai tambah yang memiliki semangat membangun perekonomian domestik."

Kajian ekonomi Lemhannas RI ini juga menghadirkan Narasumber dari Dewan Energi Nasional Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M. Sc., Ph. D; Pakar Pertambangan Dr. IR. S. Witoro Sularno, M. Sc.; Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nur Hidayati, dan Tenaga Ahli Pengajar Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Prof. Dr. Jana Tjahjana Anggradiredja, MS. Apt. Selain itu, turut hadir dalam diskusi ini yakni Wakil Gubernur Marsdya TNI Dede Rusamsi, S.E. serta tenaga ahli pengajar, tenaga ahli pengkaji, dan tenaga profesional Lemhannas RI.

"Ke depan kita bersama-sama harus mengawal ekonomi Indonesia yang saat ini sudah berada di jalan yang benar dan menjadikan sumber kekayaan alam ini menjadi berkah alam (*natural blessing*) bukan kutukan alam (*natural curse*)," harap Budi Susilo Soepandji.



Foto : Humas Lemhannas RI

Lemhannas RI Menerima kunjungan NIDS Jepang

National Institute for Defense Studies (NIDS) Jepang mengadakan kunjungan ke Lemhannas RI pada Jumat (30/5). Para delegasi diterima oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Diplomasi Marsda TNI Ir. Beng Tardjani, M.Sc. yang didampingi oleh Kepala Biro Humas Laksma TNI E. Estu Prabowo, M.Sc dan Kepala Biro Kerjasama Brigjen TNI Sudibyo, S.E. dalam *courtesy call* di Gd. Trigatra Lemhannas RI.

Usai *courtesy call*, Direktur Departemen Pendidikan NIDS Osamu Kobayashi bersama anggota rombongan, terlibat dalam diskusi dengan pihak Lemhannas RI yang juga menyertakan perwakilan dari para peserta PPRA 51 dan 52. Dalam pembukaan diskusi, kedua belah pihak memperkenalkan masing-masing anggotanya sekaligus memperkenalkan dua institusi yang sama-sama memperhatikan pertahanan dan keamanan nasional ini.

Beberapa hal yang diperbincangkan mengenai perubahan kebijakan pemerintahan Jepang mengenai strategi keamanan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Perkembangan lingkungan keamanan di sekitar Negeri Sakura adalah faktor utama dalam perubahan kebijakan yang menitikberatkan pada pengembangan sistem pertahanan Jepang ini. Isu yang kemudian dibicarakan adalah mengenai konflik-konflik yang muncul di sekitar negeri Jepang dan dampaknya terhadap keamanan nasional dan global. Para delegasi Jepang ikut memberikan gambaran kepada Indonesia akan situasi dan kondisi serta hal-hal yang harus diwaspadai bila konflik terus berlanjut.

Indonesia sebagai pelopor gerakan Non-Blok di masa lalu berpendapat, bahwa konflik yang berkembang saat ini masih dapat dicarikan jalan damai sebagai penyelesaiannya. Perjanjian yang dilakukan haruslah multilateral karena konflik yang berkembang menyangkut kepentingan banyak pihak. Sikap optimis ini bukannya tanpa pertimbangan, melainkan telah dikaji demi mewujudkan keamanan global, khususnya keamanan regional negara-negara ASEAN. Diskusi antar lembaga ini diakhiri dengan bertukar cinderamata dan foto bersama. Dalam acara ramah tamah, para delegasi pun kembali mengeksplorasi hal-hal yang belum sempat dibahas dalam diskusi.



Foto : Humas Lemhannas RI

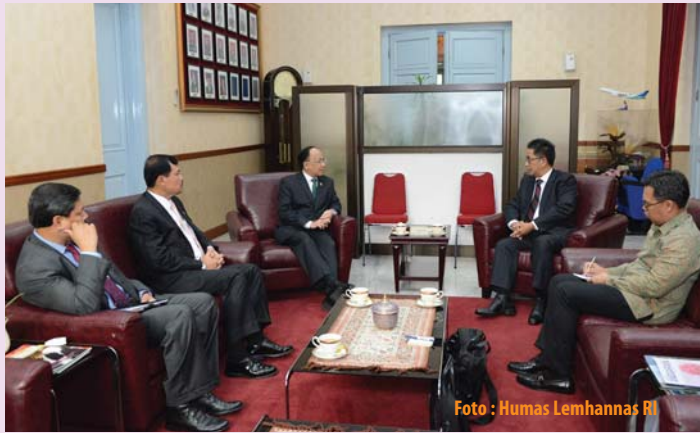


Foto : Humas Lemhannas RI

Kunjungan Dubes RI untuk Jepang

Menyikapi dinamika lingkungan strategis di kawasan Asia Pasifik, Lemhannas RI sangat terbuka untuk menerima kunjungan tamu dari negara-negara kawasan Asia Pasifik untuk berdiskusi, salah satunya adalah Jepang. Duta Besar Indonesia untuk Negara Matahari Terbit, Yusron Ihza Mahendra mengunjungi Lemhannas RI untuk bertukar pandangan terkait dengan hubungan bilateral dengan Negara Jepang. Kunjungan ini diawali dengan *courtesy call* bersama dengan Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., dan didampingi oleh Marsdya TNI Dede Rusamsi, S.E. dan Irjen Pol. Boy Salamuddin pada hari Rabu (28/5) di Gd. Trigatra Lt. 1 Lemhannas RI.

Materi yang dibahas yakni trend keamanan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang di kawasan Asia Pasifik, konsekuensi perkembangan kerjasama politik dan keamanan di daerah ASEAN, serta upaya peningkatan kerjasama guna mengelola perubahan keamanan lingkungan di suatu kawasan. Diskusi yang dipimpin oleh Deputi Pengkajian Irjen Pol Boy Salamuddin ini juga diikuti oleh sepuluh peserta PPRA 51 dan 52, yang beberapa diantaranya akan melaksanakan kunjungan studi strategis ke negeri asal bunga sakura tersebut.

Di awal diskusi, Yusron Ihza Mahendra menyampaikan pandangannya mengenai perkembangan politik Jepang saat ini dan peluang-peluang kerjasama dengan Indonesia, salah satunya adalah bidang pertahanan. Menurutnya, percepatan dalam bidang pertahanan akan banyak manfaatnya bagi Indonesia. "Apabila industri pertahanan kita kuat, maka kita akan mendapat tiga keuntungan. **Pertama** pertahanan itu sendiri yang akan semakin kuat, **kedua** kegiatan diplomasi juga akan semakin maju, dan **ketiga**, bidang perekonomian juga akan mengalami percepatan," ujar Yusron Ihza Mahendra.

Selain berbicara dalam bidang pertahanan, duta besar juga menanggapi pertanyaan peserta diskusi mengenai bidang-bidang kerjasama lain yang bisa terjalin dengan Negeri Jepang, terutama bidang pertanian. Kemajuan teknologi yang menopang pertanian di Jepang dapat menjadi contoh untuk memajukan usaha tani dan menambah hasil pertanian di Indonesia.



Lemhannas RI dan Delegasi Permanent Mission of Thailand Bicarakan Isu Keamanan

Sebagai salah satu Negara besar di kawasan Asia Tenggara, Thailand wajib berperan dalam menjaga stabilitas kawasan. Oleh karena itu, sangat diperlukan untuk menjalin hubungan antar Negara kawasan baik hubungan bilateral maupun multilateral.

Menyikapi hal tersebut, Thailand melalui delegasi *Permanent Mission of Thailand to ASEAN* yang dipimpin oleh *Director General of the Department of ASEAN Affairs* mengunjungi Lemhannas RI pada hari Rabu (29/5). Delegasi Thailand yang dipimpin oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Thailand Arthayudh Srisamoot terdiri dari sembilan anggota yang berasal dari berbagai instansi, di antaranya dari Kementerian Urusan ASEAN, Kementerian Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional, National Defence Studies Institute, ISIS Thailand dan Mahidol University.

Usai diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, pertemuan dilanjutkan dengan *courtesy call* di ruang tamu pimpinan Gd. Tri Gatra Lemhannas RI. Pimpinan delegasi Thailand menyampaikan maksud kunjungannya untuk membicarakan isu-isu terkait dengan kecenderungan (tren) keamanan jangka pendek, menengah dan panjang di Kawasan Asia-Pasifik, konsekuensi perkembangan regional terhadap kerja sama politik dan keamanan di ASEAN dan upaya untuk memperkuat kerja sama bidang keamanan guna menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkup kawasan.

Belakangan ini banyak perubahan yang terjadi di lingkup kawasan ASEAN yang jika tidak disikapi secara tepat dapat memengaruhi stabilitas dan keamanan negara-negara di kawasan, misalnya Indonesia yang akan menghadapi Pemilu Presiden pada 9 Juli 2014, kudeta militer Thailand, Myanmar, konflik Tiongkok – Vietnam, dan lain-lain.

“Meningat bahwa Ketahanan Indonesia turut dipengaruhi oleh ketahanan regional, maka Lemhannas RI, sesuai dengan tugas dan fungsinya, berupaya untuk terus memperkuat aspek Tri Gatra (geografi, sumber kekayaan alam, dan penduduk) dan Panca Gatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan)”, ungkap Gubernur Lemhannas RI. “Keragaman etnis, bahasa dan lain-lain di Indonesia dapat dipersatukan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika

dan Pancasila”, tambahnya.

Indonesia dan Thailand memiliki sejarah kerja sama yang panjang sejak pembentukan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun 1967. Dalam perkembangannya, kedua negara ini memiliki banyak kesamaan dalam hal keinginan untuk menciptakan persamaan (*equality*) bagi warganya yang beraneka ragam, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan reformasi.

Dalam *courtesy call* ini, Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Dede Rusamsi, S.E., Deputy Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Irjen Pol Boy Salamuddin, Kepala Biro Kerja Sama Brigjen TNI Sudiby, S.E. dan Kepala Biro Humas Laksma TNI E. Estu Prabowo, M.Sc. Acara *courtesy call* yang diakhiri dengan tukar-menukar cendera mata antara Gubernur Lemhannas RI dan pimpinan delegasi Thailand Arthayudh Srisamoot ini, dilanjutkan diskusi bersama dengan delegasi kedua belah pihak.

Pada sesi diskusi di ruang Nusantara I yang dimoderatori oleh Irjen Pol Boy Salamuddin, kedua belah pihak membicarakan berbagai isu regional dan nasional yang saat ini dihadapi oleh kedua negara serta solusi dalam mengatasinya. Pembicaraan ini memiliki arti yang sangat penting bagi kedua negara mengingat pada tahun 2015 akan dibentuk ASEAN Community.

Terkait dengan penanganan konflik lokal yang dilakukan Indonesia, misalnya konflik di Poso dan Maluku, Boy Salamuddin menjelaskan tentang pendekatan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik tersebut, yaitu dengan mengajak seluruh pihak yang berkonflik untuk duduk bersama dan mencari solusi dan akar permasalahannya. Selain itu, para pimpinan informal (*informal leader*) juga turut dilibatkan dan dikerahkan untuk membantu meredam dan mengakhiri konflik.

Pejabat Lemhannas RI yang mengikuti acara diskusi ini antara lain Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Geografi Mayjen TNI Endang Haerudin, S.T., M.M., Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Diplomasi Marsda TNI Beng Tardjani, M.Sc. dan Kepala Biro Kerja Sama Brigjen TNI Sudiby, S.E. Acara diskusi ini ditutup dengan foto bersama di depan Gd. Trigatra Lemhannas RI.

Jamuan Makan Gubernur Bersama Para Mantan Gubernur Lemhannas RI

Masih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-49 Lembaga Ketahanan Nasional RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. selaku Gubernur Lemhannas RI, menyambut kedatangan para mantan Gubernur Lemhannas RI dalam acara Jamuan Santap Siang di Gd. Trigatra Lt.3.

Beberapa mantan Gubernur yang hadir dalam acara yang diadakan Senin (26/5) ini antara lain Mayjen TNI Slamet Soebijakto yang menjabat selama periode 1983-1989, Letjen TNI Soekarto yang menjabat dari 1989 hingga 1993, dan Prof. Dr. Muladi, S.H. yang menjabat pada 2005-2011. Turut hadir pula dalam acara ini antara lain Mantan Wakil Gubernur, Rio Mendung Thalieb, Ketua IKAL Agum Gumelar, dan Jendral TNI Moeldoko.

Sebagai tuan rumah, Budi Susilo Soepandji menyatakan rasa terima kasih atas kedatangan para tamu pada acara ini dan berharap tali silaturahmi akan terus terjalin dengan erat. Acara Jamuan Makan ini merupakan salah satu cara Lemhannas RI untuk terus menjalin

komunikasi dengan para pejabat Lemhannas RI yang telah selesai membaktikan diri di lembaga ini. Dengan pengalaman dan kapasitas para mantan gubernur dan wakil gubernur, diharapkan dapat memberikan saran dan masukan untuk kemajuan lembaga ini di masa depan.



Foto : Humas Lemhannas RI

Sosialisasi PPRA 53 Bagi Negara Sahabat

Visi Lemhannas RI untuk menjadi lembaga nasional yang bertaraf internasional, unggul dan terkemuka, yang berlandaskan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan suatu tantangan dan peluang menjadikan Lemhannas RI menjadi institusi yang berkelas dunia (*world class institution*) melalui misi-misi yang dilakukannya.

Salah satu misi Lemhannas RI adalah menyelenggarakan pendidikan kepemimpinan yang bermutu dengan menghasilkan calon pemimpin tingkat nasional yang kompeten sesuai dengan paradigma nasional. Dalam perkembangan lima tahun terakhir, Lemhannas RI

telah merangkul Negara-negara sahabat untuk dapat mengirimkan wakilnya sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan di Lemhannas RI. Oleh karena itu, Lemhannas RI melalui Biro Kerjasama mengadakan sosialisasi Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke- 53 bagi Negara – Negara sahabat pada Selasa (3/6) di ruang Kresna Gd. Astagatra Lt. III Barat Lemhannas RI.

Tahun 2009, adalah awal pertama Lemhannas RI menerima peserta PPRA dari mancanegara. Setiap tahunnya, secara reguler Lemhannas RI menerima siswa kurang lebih 100 orang, dengan sekitar 10% dari total kuota tersebut adalah siswa perwakilan negara sahabat. Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji D.E.A. mengatakan peserta pendidikan Lemhannas RI dari mancanegara, tidak harus berlatar belakang militer saja, tetapi dapat berasal dari kalangan sipil. Dengan keikutsertaan peserta dari mancanegara tersebut diharapkan dapat meningkatkan hubungan dan mempererat kerjasama yang harmonis antara kedua negara.

Kini, jumlah peserta mancanegara yang sedang mengikuti PPRA 51 T.A. 2014 sebanyak 8 orang dari 8 negara sahabat, yaitu Malaysia, Srilanka, Aljazair, Timor Leste, Zimbabwe, Liberia, Thailand, dan Myanmar. Sementara untuk PPRA 52 T.A. 2014 berjumlah 5 orang dari 5 negara sahabat, yaitu Pakistan, Saudi Arabia, Myanmar, Zimbabwe, dan Singapura.



Foto : Humas Lemhannas RI

Lemhannas RI Merancang Program Pendidikan Kebangsaan untuk Anggota DPR RI Terpilih



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. mengadakan kunjungan dan konsultasi ke Kantor Ketua DPR RI Dr. H. Marzuki Alie pada Jumat (7/6). Dalam kesempatan ini, Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Marsekal Muda TNI (Purn) Syahrul Ansory selaku Tenaga Profesional Bidang Hubungan Internasional, Deputi Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, Laksda TNI Ir. Leonardi, Kepala Biro Humas Laksma TNI E. Estu Prabowo, M.Sc, dan Kepala Biro Kerjasama Brigadir Jendral TNI Sudiby, S.E.

Pertemuan yang dilaksanakan di ruang kerja Ketua DPR RI ini, membahas ide Lemhannas RI untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang ketahanan nasional bagi para anggota DPR hasil pemilihan legislatif 2014 yang akan dilantik tahun ini.

Tampilnya wajah-wajah baru hasil Pemilu Legislatif pada 9 April lalu, muncul harapan yang besar bahwa para wakil rakyat ini akan dapat membawa perubahan yang lebih baik pada masa jabatannya nanti. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa wajah-wajah baru ini mungkin belum sepenuhnya memahami karakter negarawan yang harus mendahulukan kepentingan rakyat banyak. Atas dasar itulah Budi Susilo Soepandji menindaklanjuti ide-ide dan saran dari

berbagai pihak mengenai perlunya pendidikan bagi para anggota DPR terpilih.

Ada tiga hal yang masih perlu dikaji lebih lanjut untuk merealisasikan program ini, yakni mekanisme pelaksanaan, durasi pendidikan, dan materi yang akan diajarkan. Tiga hal inilah yang dikonsultasikan oleh Gubernur Lemhannas RI kepada Ketua DPR RI. Koordinasi antara kedua lembaga ini sangat menentukan keberhasilan program yang sedang dirancang.

Mendengar usul dari Budi Susilo Soepandji, Marzuki Alie yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, SH., M.Si. dan Deputi Bidang Perundang-undangan, K. Johnson Rajagukguk, SH., M.Hum. menanggapi dengan sangat positif. "Selama lima tahun ini saya merasa bahwa rekrutmen, kaderisasi, pendidikan dan pelatihan pengkaderan partai tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, saya pikir program Lemhannas ini akan menjawab persoalan-persoalan tersebut." Tanggapan yang positif dan pertimbangan yang diberikan oleh pihak DPR diharapkan dapat berlanjut pada kerjasama yang lebih baik di masa depan, khususnya dalam program pendidikan Lemhannas RI yang kini sedang dirancang.

Regenerasi Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji dan Pejabat Struktural



Penyelenggaraan pendidikan dan pengkajian, bagi Lemhannas RI merupakan dua manifestasi dari tiga misinya untuk menjadi lembaga nasional yang bertaraf internasional, unggul dan terkemuka, yang berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Bertolak dari hal tersebut, maka kapasitas sumber daya manusia yang ada pun harus terus ditingkatkan agar tercipta proses pengajaran dan pengkajian yang efektif, efisien, profesional, dan modern termasuk di dalamnya para Tenaga Ahli Pengajar dan Tenaga Ahli Pengkaji yang berkualitas selaku ujung tombak fungsi tersebut. Untuk menjaga kualitasnya, Lemhannas RI dalam kurun waktu tertentu melakukan regenerasi pejabat.

Dalam rentang waktu kurang lebih dua minggu, yakni pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 dan 5 Juni 2014, Lemhannas RI telah melakukan acara Serah Terima Jabatan, Pelantikan, dan Pelepasan Tenaga Ahli Pengajar dan Tenaga Ahli Pengkaji serta beberapa Pejabat Struktural Eselon II. Dalam dua kesempatan tersebut, total personel yang menjalani prosesi pergantian mencapai 18 pejabat yang terdiri dari Tenaga Ahli Pengajar maupun tenaga Ahli Pengkaji yang melakukan serah terima jabatan (baik yang dilantik maupun yang dilepas).

Berikut beberapa pejabat baru yang akan melaksanakan amanat negara di Lemhannas RI antara lain Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M. Agr., Brigjen TNI Syahiding, Brigjen TNI Andogo Wiradi, Brigjen TNI M. Anang Sutisna, S.Ip, M.Si., Marsma TNI Dwi Djatmiko S.B., S.E., Laksma TNI Untung Suropati, Brigjen TNI Sudirman Kadir, Marsma TNI Bonar H. Hutagaol, S.E., Brigjen TNI Torry Djohar Banguntoro, Laksma TNI Ari Soedewo, S.E., Laksma TNI Siwi Sukma Adji, dan Brigjen TNI Bambang Hartawan, M.Sc.

Dalam sambutannya Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA berharap kepada seluruh pejabat baru yang akan

mengemban tugas Negara di Lemhannas RI agar dapat menunjukkan kapasitas dan kualitasnya sebagai tenaga ahli pengajar maupun tenaga ahli pengkaji.

“Dengan segala potensi yang saudara miliki dan kepercayaan yang telah diberikan oleh negara, dapat dijadikan sebagai motivasi dan dorongan bagi saudara untuk lebih meningkatkan kinerja agar kualitas pengajaran dan pengkajian di lembaga ini menjadi semakin baik lagi,” harap Budi Susilo Soepandji.

Harapan tersebut diungkap Gubernur karena memandang bahwa tenaga ahli pengajar dan tenaga ahli pengkaji memiliki peran kunci dan sebagai ujung tombak dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dan pengkajian dengan semangat reformasi birokrasi dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kinerja organisasi.

Sementara itu juga, terdapat beberapa Tenaga Ahli dan pejabat struktural eselon II yang di lepas, yaitu Mayjen TNI Syafri Mahyudin yang menjadi Staf Khusus Panglima TNI, Marsda TNI Potler Gultom, S.H. dengan jabatan baru sebagai Komandan sekolah staf dan Komando Angkatan Udara, Mayjen TNI Avianto Saptono sebagai Staf Ahli Tingkat III Bidang Sosial Budaya dan HAM Panglima TNI, Laksda TNI Herry Setia Negara, S.Sos., menjadi Komandan Sekolah Staf Dan Komando Angkatan Laut, S.H., M.M, Mayjen TNI (Mar) Lukman Sofyan sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Laut dan Brigjen TNI Wiyarto, S.Sos. yang mendapat kepercayaan sebagai Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Budi Susilo Soepandji mengucapkan selamat dan rasa terima kasihnya atas pengabdian yang selama ini telah mereka berikan kepada Lemhannas RI. Gubernur juga mengapresiasi atas pengabdian Mayjen TNI Abdul Chasib yang telah memasuki masa purna tugasnya sebagai tenaga ahli pengkaji dengan baik dan bertanggung jawab.